

SKRIPSI

***ANALISIS PRO-POOR BUDGET* SEBUAH UJI *POVERTY
REDUCTION TEST* PADA APBD KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019-2021**

**RESKY RAMADHAN RUSDI
A031191052**



**Kepada
DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS *PRO-POOR BUDGET* SEBUAH UJI *POVERTY REDUCTION TEST* PADA APBD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019-2021

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

RESKY RAMADHAN RUSDI



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

ANALISIS *PRO-POOR BUDGET* SEBUAH UJI *POVERTY REDUCTION TEST* PADA APBD KABUPATEN SOPPENG 2019-2021

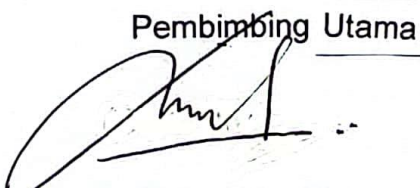
disusun dan diajukan oleh

RESKY RAMADHAN RUSDI
A031191052

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

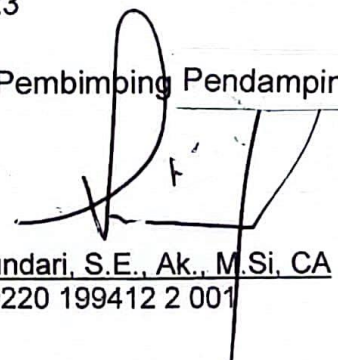
Makassar, 15 Desember 2023

Pembimbing Utama



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA
NIP. 19590810 198702 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 19660220 199412 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E, M.Si
NIP. 19660307 199403 1 003

SKRIPSI



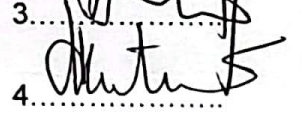

ANALISIS *PRO-POOR BUDGET* SEBUAH UJI *POVERTY REDUCTION TEST* PADA APBD KABUPATEN SOPPPENG 2019-2021

Disusun dan diajukan oleh

RESKY RAMADHAN RUSDI
A031191052

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nurleni, A.k., M.Si., CA	Ketua	1. 
2. Dr. Hj. Sri Sundari, S.E.,A.k, M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3. Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasjid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Resky Ramadhan Rusdi

NIM : A031191052

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa skripsi saya dengan judul

**ANALISIS *PRO-POOR BUDGET* SEBUAH UJI *POVERTY REDUCTION TEST*
PADA APBD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019-2021**

Merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan sependek pengetahuan saya pada penjelasan skripsi ini tidak ada karya ilmiah yang sudah diajukan oleh orang lainnya sebagai proses perolehan gelar akademik dalam perguruan tinggi, dan tidak ada pendapat serta karya yang pernah diterbitkan atau ditulis orang lain, kecuali dalam tulisan dikutip pada naskah ini dan dijelaskan pada daftar pustaka serta sumber kutipan.

Jika nanti ternyata pada skripsi ini bisa dijelaskan ada unsur plagiasi, saya siap mendapatkan sanksi dari tindakan ini dan diproses berdasarkan aturan yang ada (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Desember 2023

at pernyataan,

Resky Ramadhan Rusdi

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, karunia dan rahmatNya sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi berjudul “**Analisis *Pro-poor Budget* Sebuah Uji *Poverty Reduction Test* Pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2021**”. Skripsi ini disusun menjadi akhir dari serangkaian proses belajar dan sebagai pemenuh syarat dalam melakukan ujian sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.

Peneliti sadar selama proses pembuatan skripsi ini telah diterima banyak dukungan dan bimbingan yang diterima peneliti dari berbagai pihak. Maka dengan kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih untuk Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta memudahkan pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir.

Terimakasih kepada kedua orang tua peneliti tercinta, Rusdi dan Alm. Mardiana, saudara peneliti, yaitu Restu Syawal Rusdi yang telah mendukung, memotivasi, mengingatkan dan mendoakan kelancaran penelitian ini kepada peneliti. Terima kasih kepada bapak karena telah mendorong peneliti tiap harinya untuk mengerjakan skripsi dan meraih berbagai kesempatan yang bisa diraih dan telah membiayai masa perkuliahan ini, walaupun mama telah menghadap sang pencipta tapi saya merasa beliau selalu hadir dan menjadi salah satu alasan penulis bertahan hingga saat ini.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pertama-tama kepada Ibu Dr.

Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku penasehat akademik penulis yang setia memberi motivasi dan nasehat bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam memotivasi dan membimbing penulis menyelesaikan secara maksimal. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Haliah, S.E., Ak., CA., CWM., CRP., CRA selaku penguji I serta Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku penguji II yng telah memberi arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Serta kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak bisa disebut satu per satu oleh peneliti dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan daring dan luring.

Ucapan terimakasih tak lupa kepada Bapak dan Ibu Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang telah membantu penulis hingga tugas akhir skripsi ini dapat selesai.

Keluarga Besar penulis utamanya nenek Hj. Sakina yang tidak hentinya berusaha menjadi sosok pengganti mama dalam kehidupan penulis dan Keluarga Besar GLORY ORGANIZER yang selalu memberi motivasi, tempat tinggal dan wejangan saat penulis dititik terendah hingga saat ini. Terimakasih kepada kawan setia penulis Nasrullah, Nur Fitri Syawal, dan Nur Maulidiyah Rahmah yang selalu

setia, ikhlas dan sabar dalam membantu segala hal untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada keluarga besar PROJECT CELL yang telah memberi tumpangan hidup diakhir perkuliahan dan Sandi Kurniawan, S.M., yang telah membantu penulis dalam banyak hal hingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Pada kesempatan ini peneliti juga berterimakasih kepada Keluarga Besar UKM Teater Kampus Unhas yang selalu menjadi rumah dan bagian cerita penulis selama menjadi mahasiswa sejak 2019 hingga saat ini dan seterusnya. Kepada Kawan-kawan Negara Sahabat, BnS, Grup-Grup, Eni yang senantiasa hadir dalam setiap proses yang penulis lalui bersama sejak awal kuliah hingga saat ini, begitu banyak hal yang senantiasa mereka dengar dengan ikhlas dan menjadi peduli. Semoga kelak kesuksesan membersamai kita. Juga kepada Kak Rio dan Kak Nita yang selalu menjadi tempat penulis diskusi dan memberi motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik yang mendukung dan membantu sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Peneliti sadar jika skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih memiliki kekurangan. Maka, diharapkan bahwa peneliti dapat menerima kritik dan saran yang membangun dan semoga penelitiannya bisa bermanfaat untuk pembaca dan ilmu pengetahuan.

Makassar, 21 April 2024

Resky Ramadhan Rusdi

ABSTRAK

Analisis *Pro-poor Budget* Sebuah Uji *Poverty Reduction Test* Pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2021

Pro-poor Budget Analysis: A Poverty Reduction Test in the 2019-2021 Soppeng Regency APBD

Resky Ramadhan Rusdi

Nurleni

Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar alokasi anggaran yang bersifat *pro-poor* di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Analisis data yang dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Soppeng serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, kemudian dianalisis menggunakan Uji *Poverty Reduction Test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) anggaran bersifat *pro-poor* pada tahun 2019 sektor pendidikan meningkat pada tahun 2020, namun menurun drastis ditahun 2021 disebabkan karena banyaknya program melalui kebijakan yang mengalami perubahan. (2) anggaran bersifat *pro-poor* pada tahun 2019 sektor kesehatan meningkat pada tahun 2020, namun menurun ditahun 2021 disebabkan karena banyaknya program melalui kebijakan yang mengalami perubahan.

Kata kunci: Anggaran, *Pro-poor*, Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Uji *Poverty Reduction Test*

This research aims to find out and analyze how much budget allocation is pro-poor in the education sector and health sector. Data analysis was carried out using the Soppeng Regency Government Regional Revenue and Expenditure Budget as well as the Soppeng Regency Government Budget Realization Report and the Soppeng Regency Health Service and Education Service, then analyzed using the Poverty Reduction Test. The results of this research show that (1) the pro-poor budget in 2019 for the education sector increased in 2020, but decreased drastically in 2021 due to the many programs through policies that underwent changes. (2) the pro-poor budget in 2019 for the health sector increased in 2020, but decreased in 2021 due to the number of programs through policies that underwent changes.

Keywords : Budget, *Pro-poor*, Education Sector, Health Sector, Poverty Reduction Test

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kebijakan Anggaran di Pemerintah Daerah	11
2.1.1 Kerangka Konseptual Penganggaran	11
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.2 Kebijakan Anggaran <i>Pro-Poor</i>	14
2.2.1 Kerangka Konseptual Anggaran <i>Pro-Poor</i>	14
2.2.2 Nilai Lebih <i>Pro-poor Budgeting</i>	17
2.2.3 Peraturan Pemerintah tentang Anggaran <i>Pro-Poor</i>	17
2.2.4 Kategori dan Ciri-ciri Anggaran yang bersifat <i>Pro-Poor</i>	18
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
2.4 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Rancangan Penelitian	23

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Sumber data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	26
3.5.1 Uji <i>Poverty Reduction Test</i>	26
3.5.2 Ciri-ciri Anggaran bersifat <i>Pro-poor</i>	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis	29
4.1.2 Arti Lambang Kabupaten Soppeng.....	30
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Soppeng	33
4.2 Hasil Penelitian.....	35
4.2.1 Uji <i>Poverty Reduction Test</i>	35
4.2.1.1 Sektor Pendidikan.....	35
4.2.1.2 Sektor Kesehatan	39
4.2.2 Ciri-ciri Anggaran bersifat <i>Pro-poor</i>	42
4.2.2.1 Sisi Pendapatan	42
4.2.2.2 Sisi Pendapatan	43
BAB V KESIMPULAN.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
5.3 Keterbatasan Penelitian	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Tren Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng.....	2
Tabel 4. 1 Total Anggaran yang Bersifat Pro-poor Pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan 2019 - 2021	35
Tabel 4. 2 Anggaran Sektor Pendidikan Kabupaten Soppeng Bersifat Pro-poor 2019 – 2021.....	36
Tabel 4. 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Soppeng	38
Tabel 4. 4 Angka Putus Sekolah Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2021	38
Tabel 4. 5 Anggaran Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng Bersifat Pro-poor 2019 - 2021	40
Tabel 4. 6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2021	41
Tabel 4. 7 Angka Balita Mengalami Stunting dan Balita Mengalami Gizi Buruk Kabupaten Soppeng Tahun 2019 - 2021.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Logo Kabupaten Soppeng.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan masih menjadi topik menarik didiskusikan oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Mulai dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini persoalan kemiskinan masih belum bisa teratasi secara tuntas meskipun telah banyak kebijakan maupun program yang telah dibuat pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah orang miskin masih cukup tinggi hingga tahun 2021. Jumlah penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik (2021:3), pada September 2021 mencapai 26,05 juta orang.

Angka kemiskinan ini ditunjukkan pada garis kemiskinan sebesar Rp486.168/ kapita/bulan baik untuk kebutuhan pangan maupun selain pangan. Angka tersebut didistribusikan di semua provinsi di Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan dan menurut Badan Pusat Statistik (2022:252) Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, masih ada sekitar 17,27 ribu penduduk miskin di Kabupaten Soppeng atau sekitar 7,53 persen dari total penduduk Kabupaten Soppeng yaitu 235.574 ribu orang. Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp.341.484,00/orang/bulan.

Kemiskinan sendiri tidak bisa hanya diukur dari besaran pendapatan suatu masyarakat, menurut Amartya Sen dalam Indro (2013): "Kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi, dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi". Supriatna, (1997:90)

menyatakan bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh situasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada, situasi keterbatasan ini terjadi karena salah satunya disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik itu pada jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 selalu mengalami fluktuasi. Tren angka kemiskinan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tren Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng

Tahun (1)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) (2)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) (3)	Presentase Penduduk Miskin (4)
2014	207.084	19,78	8,76
2015	213.164	18,88	8,36
2016	220.192	19,12	8,45
2017	225.936	18,80	8,3
2018	253.457	17,00	7,5
2019	297.546	16,45	7,25
2020	315.455	17,23	7,59
2021	341.484	17,27	7,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sekitar 16,45

ribu jiwa sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sekitar 17,23 ribu jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 17,27 ribu jiwa.

Oleh karena itu, persoalan kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan kemiskinan telah sepakat bahwa ketika membahas persoalan kemiskinan, persoalan ini harus dipandang sebagai persoalan yang bersifat multidimensi. Di dalamnya antara lain mencakup persoalan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan berupa keterbukaan lapangan kerja, kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Jika dicermati, dibalik perlibatan unsur multidimensi dalam pemahaman mengenai kemiskinan sebenarnya terkandung makna adanya perubahan mendasar terhadap filosofi kemiskinan (Mawardi dan Sumarto,2003:1).

Pada umumnya masyarakat yang tergolong kelompok miskin adalah kelompok residual atau mereka yang tidak tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, negara sebagai suatu institusi yang berkewajiban memastikan seluruh warga negaranya dapat hidup sejahtera sesuai amanat konstitusi. Pemerintah sebagai pelaksana tata kenegaraan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui kebijakan yang berpihak kepada orang miskin atau *pro poor policy*. Untuk itu, penyusunan APBD di harapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Nurmasyitah & Mislinawati, 2017).

Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan anggaran sangatlah terbatas, sementara anggaran harus memprioritaskan dan menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat yang seringkali berbenturan. Maka dari itu anggaran harus memiliki prioritas mengenai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Melalui anggaran pemerintah dapat merencanakan kegiatan dengan penentuan sumber daya dan bagaimana pemerintah dapat menggunakannya (Sopanah, 2009). Meningkatkan proporsi alokasi anggaran atau realisasi anggaran kepada masyarakat miskin menjadi tolak ukur penerapan kebijakan *pro-poor budgeting* (Nursini dkk, 2018)

Wildavsky (2004) berpendapat bahwa setiap program yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dapat ditentukan besaran anggaran yang diberikan tergantung dari banyaknya uang yang diterima dan memberikan sebuah manfaat. Penyusunan APBD merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu keputusan dalam penyusunan APBD dapat dipengaruhi dari berbagai perspektif seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Kebijakan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin ini telah memberikan pemerintah daerah lebih banyak ruang di era desentralisasi fiskal. Ada dua pilar desentralisasi fiskal yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di daerah, yaitu pengeluaran dan hubungan antar kebijakan fiskal pemerintah. Soejoto et al (2015) dan Maharajabdinul et al (2015) menemukan peningkatan dana desentralisasi tidak diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan di Indonesia. Itu studi tentang transfer dana sebagai ukuran desentralisasi fiskal dan pengentasan kemiskinan umumnya menggunakan analisis dan fokus kuantitatif di tingkat nasional, pendekatan kualitatif dan fokus pada lokal tingkat pemerintahan relatif terbatas. Studi empiris

di tingkat pemerintah daerah penting karena pemerintah daerah lebih sadar akan kebutuhan aktual masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam merumuskan perencanaan program dan penganggaran terkait pengentasan kemiskinan (Manaf et al. 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2011) yaitu konstruksi kebijakan anggaran yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, pemerintah setempat memberikan prioritas anggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk semua masyarakat secara gratis. Pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya dianggap masyarakat sebagai hal yang sulit dijangkau dan tidak murah justru menjadi perhatian lebih bagi pemerintah setempat. Menurutnya, kebijakan fiskal sendiri merupakan gerakan sosial yang diciptakan oleh perilaku masyarakat, kepentingan kelompok, dan/atau tekanan kelompok tertentu. Kebijakan ini muncul setelah sejumlah aktor tampil mengidentifikasi pendidikan sebagai suatu permasalahan dan terlibat dalam proses perilaku kolektif sehingga melahirkan gerakan sosial. Seperti yang diilustrasikan pada langkah terakhir, para pembuat kebijakan berpartisipasi dalam penciptaan masalah melalui tindakan pemecahan masalah mereka. Kebijakan fiskal yang bersifat *pro-poor* adalah reformasi keuangan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan akibat buruknya implementasi kebijakan fiskal sebelumnya yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan (Nursini dkk, 2018)

Peneliti menitikberatkan pada anggaran *pro-poor*, dan ada tiga alasan penting yang mendasari kebijakan ini. Pertama secara konteks, kondisi kemiskinan hari ini mengharuskan negara menerapkan anggaran *pro-poor*, kedua banyaknya kebijakan sosial ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada

masyarakat miskin sehingga harus direformasi, dan terakhir kebijakan desentralisasi dan demokrasi lokal yang dapat menjadi penunjang berkembangnya *pro-poor budget* ini (Sopannah, 2009). Sebagaimana peran Negara untuk memastikan kesejahteraan setiap warga negaranya, anggaran *pro-poor* ini sebaiknya dilihat sebagai upaya negara dalam mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini *pro-poor* ini memungkinkan adanya desain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dengan demikian anggaran *pro-poor* ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan terpenuhinya hak-hak dasarnya melalui proyek yang dirancang dalam kebijakan anggaran tersebut (Suhirman, 2007).

Kebijakan *pro-poor budget* ini dapat diidentifikasi melalui proses dan alokasi anggarannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap isi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk memastikan apakah kebijakan tersebut berpihak terhadap masyarakat miskin atau tidak. Dari sisi alokasi belanja dalam APBD perlu dilihat secara teliti apakah pengalokasian anggaran untuk program yang telah direncanakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak. Dalam menilai kebijakan *pro-poor* dapat dimulai dengan melihat bagaimana kualitas pemahaman manusia terhadap faktor utama penyebab kemiskinan, hal ini dimungkinkan agar rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat berkualitas dan memiliki relevansi dengan masalah kemiskinan yang terjadi (Has dkk, 2017). Penerapan penganggaran yang bersifat *pro-poor* bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah merencanakan dan menganggarkan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan (Nursini dkk, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2011) yaitu mengukur alokasi anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan, hasil dari penelitian

berkesimpulan bahwa pemerintah kota Surakarta melalui dinas pendidikan sudah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dengan jumlah yang cukup besar melalui beberapa program diantaranya program wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun.

Selain itu penelitian yang dilakukan Khuzaimah (2018) menjelaskan bahwa anggaran *pro-poor* berfokus pada peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini sangat berperan penting dalam upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki atau disebut sebagai Indeks Potensi Manusia (IPM). Pada dasarnya IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:

1. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup.
2. Berpengetahuan dan berketerampilan.
3. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Poverty Reduction Test sebagai salah satu alat untuk mengukur apakah program pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dengan memperhatikan alokasi anggaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai variabelnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan apakah anggaran pemerintah Kabupaten Soppeng berpihak terhadap masyarakat miskin (*Pro-poor Budget*) melalui pengamatan terhadap alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan judul Analisis *Pro-poor Budget* Sebuah Uji *Poverty Reduction Test* Pada APBD Kabupaten Soppeng tahun 2019 – 2021.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Soppeng di sektor pendidikan bersifat *pro-poor*?
2. Apakah alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Soppeng di sektor kesehatan bersifat *pro-poor*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Soppeng di sektor pendidikan bersifat *pro-poor*.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Soppeng di sektor kesehatan bersifat *pro-poor*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada bagian kegunaan penelitian menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan bidang ilmu akuntansi khususnya sektor publik dalam membahas anggaran *pro-poor* di Pemerintah Daerah dan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pembaca terkait kebijakan anggaran *pro-poor* di pemerintah

daerah dengan menggunakan *poverty reduction test* yang didukung oleh berbagai teori yang melandasi penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai kebijakan anggaran pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

3. Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat miskin khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

4. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan anggaran *pro-poor* pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang memberikan jawaban atas pertanyaan terkait apa yang diteliti? Untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi deskripsi teoritis tentang variabel yang dilibatkan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memberikan penjelasan terkait rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari uji *poverty reduction test* mengenai anggaran *pro-poor*.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan dari hasil penelitian dan saran terhadap pihak-pihak yang akan menggunakan penelitian ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Anggaran di Pemerintah Daerah

2.1.1 Kerangka Konseptual Penganggaran

Anggaran sektor publik merupakan program kerja yang diukur dalam satuan finansial yang disusun dan digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berisi informasi terkait pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Anggaran memegang peran penting dalam organisasi sektor publik karena kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atas jasa yang diberikan (Nordiawan,2006:47). Anggaran ini merupakan pernyataan dari pemerintah mengenai taksiran penerimaan dan belanja pada tahun berjalan yang menunjukkan kebijakan pemerintah di bidang social maupun ekonomi. Hal ini berlaku baik di anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Anggaran merupakan alat dalam pelaksanaan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik. Mardiasmo (2004: 63) menjelaskan fungsi anggaran daerah dalam beberapa hal antara lain:

1. Sebagai *planning tool* yaitu anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
2. Sebagai *control tool* yaitu merupakan alat dalam melakukan pengendalian yang digunakan untuk menghindari adanya *overspending* dan salah satu sasaran dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas.
3. Sebagai *performance measurement tool*, dimana anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder kepada pemberi wewenang.

4. Sebagai *public sphere*, dimana anggaran digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang public yang melibatkan pemerintah, birokrat, DPR, masyarakat perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama pemerintah pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen, diantaranya pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Suhandi, (2007:6) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka menengah perlu diperhatikan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 pasal 64 ayat 2 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Penyusunan APBD bertujuan untuk mengetahui anggaran pengeluaran belanja daerah dan membandingkan tingkat pengeluaran dan pemasukan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 menyebutkan bahwa APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua bentuk penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari,

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
- b) Dana Perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c) Pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan pendapatan selain PAD dan dana perimbangan, terdiri dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain yang ditetapkan pemerintah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dapat dibagi berdasarkan organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

- a) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
 - b) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara, diantaranya untuk pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan serta perlindungan social.
 - c) Klasifikasi belanja menurut program disesuaikan dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d) Klasifikasi belanja menurut kegiatan disesuaikan dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja, diantaranya : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

2.2 Kebijakan Anggaran *Pro-Poor*

2.2.1 Kerangka Konseptual Anggaran *Pro-Poor*

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh

terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997:82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. Usaha-usaha yang dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Proses penyusunan dan pengambilan kebijakan ini merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di suatu Negara. Otonomi daerah memberikan peran yang nyata pada Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah penerapan *pro-poor policy* atau kebijakan yang memihak rakyat miskin. Secara sederhana kebijakan ini dapat dilihat sebagai proses pelibatan kelompok miskin baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Mirzakhanyan *et al* dalam Alemina *et al* (2011) Kebijakan *pro-poor policy* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang berfokus pada pengembangan manusia dengan tujuan untuk memperkuat sumberdaya modal manusia dan mengembangkan kesempatan bagi masyarakat miskin. yang berpihak pada

penduduk miskin adalah reformasi anggaran yang berpihak pada penduduk miskin. Terdapat beberapa belanja publik yang secara alami memiliki sifat *pro-poor*, diantaranya belanja untuk pemenuhan kesehatan dasar dan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan pada aspek pendidikan secara universal sebagai upaya meningkatkan kehidupan social ekonomi.

Kebijakan *pro-poor policy* ini kemudian diturunkan menjadi kebijakan *pro-poor budget* yang muncul dari kelemahan implementasi kebijakan anggaran sebelumnya yang tidak berpihak pada orang miskin. Ini ditunjukkan dengan jumlah orang miskin yang tidak mendapat manfaat dari hasil pembangunan. Menurut Kakembo (2016) bahwa anggaran yang berpihak pada penduduk miskin memiliki arti penting untuk mendistribusikan kembali dana untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai ini, orang miskin harus dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran, proses ini untuk memastikan bahwa program bantuan dan pengeluaran pemerintah untuk layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan sepenuhnya ditentukan dan dinikmati oleh mereka.

Anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin (*pro-poor budgeting*) dapat diterjemahkan sebagai praktek perencanaan dan penganggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (Rinusu, 2006:2). Tahap penyusunan anggaran harus memegang beberapa prinsip diantaranya harus mengedepankan: 1) partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran 2) transparansi dan akuntabilitas anggaran 3) disiplin anggaran 4) keadilan anggaran 5) efisiensi dan efektivitas anggaran 6) taat asas dalam penyusunan anggaran. Jika prinsip-prinsip tersebut dapat di laksanakan

dengan baik maka pengalokasian anggaran untuk kepentingan rakyat (*pro-Spoor budget*) akan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal (Sopannah, 2004).

2.2.2 Nilai Lebih *Pro-poor Budgeting*

Nilai Lebih *Pro-poor Budgeting* dibandingkan penerapan anggaran yang bersifat netral menurut Rinusu (2006:30) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat (*social welfare function*) menjadi lebih optimal, karena untuk jumlah rupiah yang sama, tambahan nilai marginalnya lebih tinggi jika dibelanjakan untuk kepentingan kaum miskin dibandingkan jika dibelanjakan untuk kepentingan kaum kaya.
2. Mempercepat proses demokratisasi melalui mekanisme proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, misalnya, memberikan ruang bagi kaum miskin untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya terhadap kebijakan anggaran publik.
3. Faktor pendorong terciptanya stabilisasi politik dan sosial, karena kepentingan kaum miskin yang selama ini cenderung tertinggalkan sehingga mengakibatkan frustrasi yang berkepanjangan.
4. Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Dengan menerapkan *Pro-Poor Budgeting*, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan transparan. Kebutuhan-kebutuhan sosial dasar kaum miskin seperti sarana kesehatan, pendidikan dan pengembangan usaha-usaha produktif menjadi lebih mudah terpenuhi.

2.2.3 Peraturan Pemerintah tentang Anggaran *Pro-Poor*

Peraturan Pemerintah tentang *Pro-Poor Budgeting* Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan rencana kerja daerahnya harus mempertimbangkan analisis kemiskinan dan kesetaraan gender dalam menyusun kebijakan, program serta kegiatan pembangunan.

2.2.4 Kategori dan Ciri-ciri Anggaran yang bersifat *Pro-Poor*

Kategori anggaran yang berpihak pada orang miskin atau *pro-poor budgeting* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pertama, alokasi anggaran yang secara langsung di peruntukan dan diterima oleh rakyat miskin. Kedua, alokasi anggaran yang secara tidak langsung diperuntukan bagi rakyat miskin tetapi memberikan dampak dan manfaat positif terhadap mereka. Selanjutnya ciri-ciri anggaran yang berpihak pada orang miskin (*pro-poor budgeting*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi Pendapatan Daerah dan sisi Belanja Daerah. Adapun ciri-ciri anggaran yang *pro-poor* tersebut yaitu:

1. Sisi Pendapatan Daerah
 - a. Sedapat mungkin tidak memungut pajak dan retribusi terhadap transaksi pemenuhan pelayanan dasar publik, misalnya; retribusi puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
 - b. Tidak menjadikan pajak dan retribusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin sebagai sumber pendapatan utama daerah.
 - c. Tidak membebani orang miskin dengan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi.
2. Sisi Belanja Daerah
 - a. Adanya alokasi anggaran untuk subsidi pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin. Misalnya bahan kebutuhan pokok, pembebasan bea pendidikan, dan lain-lain.

- b. Adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang berpihak kepada orang miskin, misalnya puskesmas, pustu, jalan desa, dan air bersih.
- c. Adanya alokasi anggaran untuk melakukan pendataan kelompok miskin dan asesment kebutuhan kelompok miskin.
- d. Adanya alokasi anggaran untuk memberikan ruang partisipasi dan aktualisasi diri kelompok miskin.
- e. Adanya alokasi anggaran untuk perencanaan dan menilai dampak program/kegiatan terhadap orang miskin. (LGSP-USAID, 2009:7).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis dan menyusun landasan teori, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Padriansyah (2015) berjudul Analisis Penerapan dan Perkembangan *Pro-poor Budget* di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013. Hasilnya menggambarkan permasalahan mengenai seberapa besar anggaran yang dialokasikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Data yang digunakan adalah data APBD Provinsi Sumatera Selatan, RPJMD, data Alokasi Anggaran di SKPD khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *pro-poor budgeting* di Sumatera Selatan dikategorikan sangat berpihak selama 2009-2011 dan cukup berpihak selama 2012 dan 2013.
2. Penelitian Widianingsih (2011) dengan judul "Mengukur Alokasi Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD Kota Surakarta), membahas permasalahan mengenai seberapa besar anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan baik secara sektoral maupun aggregate di Kota Surakarta.

Data yang digunakan adalah data APBD Kota Surakarta Tahun 2007 dan 2009 beserta dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) per satuan kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara sektoral Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dengan jumlah yang relative besar melalui beberapa programnya dan secara aggregate jumlah yang dialokasikan di sektor pendidikan masih relative kecil.

3. Penelitian Mawardi dan Sudarno (2003) dengan judul “Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: *Pro-poor Budgeting*)” menjelaskan juga permasalahan tentang kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan adalah *pro-poor budgeting* yang harus dipandang sebagai salah satu kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Hasilnya dalam mencapai terciptanya kebijakan *pro-poor budgeting* maka diperlukan kebijakan awal seperti *pro-poor policy, pro-poor institutions, pro-poor goverment*. Kemudian dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran diperlukan tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penyusunan anggaran, aspek penerimaan daerah dan aspek pembelanjaan daerah.
4. Penelitian Rahman (2011) dengan judul “Politik Anggaran yang Minus Keberpihakan”, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran sektor pendidikan dalam APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2009 tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Hal ini terbukti dari temuan-temuan lapangan. Pertama, meskipun alokasi anggaran sektor pendidikan dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2009 sebesar 35 % dari jumlah keseluruhan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2009 tetapi tidak memberikan alokasi anggaran secara konkret untuk masyarakat miskin. Kedua, program pendidikan gratis 2009 dalam implementasinya masih mempraktikkan partisipasi semu,

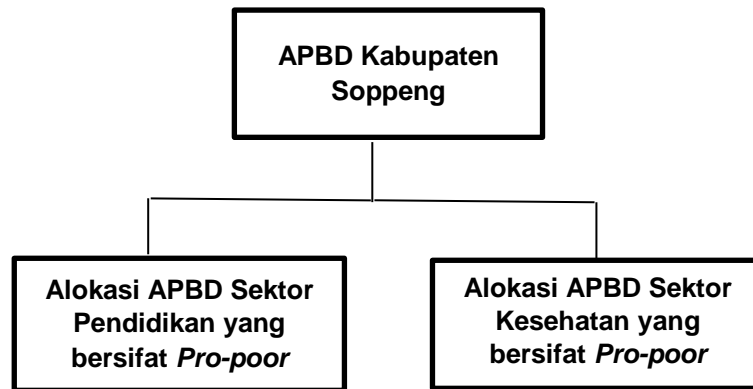
tingkat akuntabilitas dan transparansi masih tertutup, serta belum memenuhi derajat efektif dan efisien. Padahal masyarakat miskin harus mendapatkan keberpihakan, penegasan dari alokasi anggaran sehingga bisa memperoleh hak-hak dasarnya.

5. Penelitian Khuzaimah (2018) dengan judul “Pengaruh Alokasi *Pro-poor Budget* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”, penelitian ini menjelaskan arah kebijakan pemerintah provinsi Banten, menganalisis berapa besar alokasi rill APBD untuk belanja langsung kesehatan dan pendidikan, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara belanja langsung kesehatan dan pendidikan terhadap IPM provinsi Banten. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM provinsi Banten sebesar 48%.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng bersifat *Pro-Poor*. Alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua aspek yang difokuskan peneliti. Uji *poverty reduction test* digunakan untuk melihat perbandingan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan total keseluruhan anggaran selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2022)